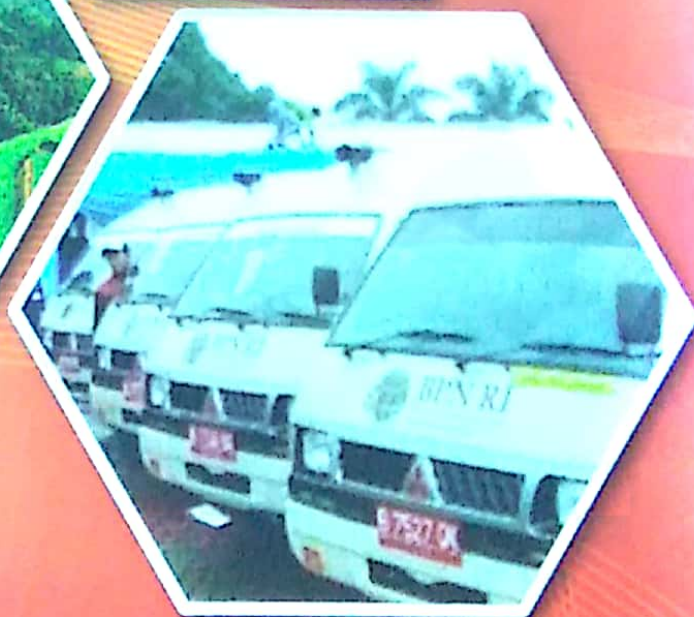


HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN ASET KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN ADVOKASI DAN DOKUMENTASI HUKUM
TAHUN 2017**

**HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERKAITAN DENGAN ASET KEUANGAN
BARANG MILIK NEGARA**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN ADVOKASI DAN DOKUMENTASI HUKUM
2017**

KATA PENGANTAR

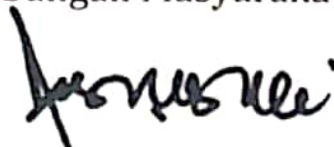
Barang Milik Negara merupakan aset Negara yang harus di rawat dan dijaga keberaannya. Ada beberapa cara perolehan Aset Barang Milik Negara salah satunya adalah dengan cara pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan dana yang berasal dari APBN/APBD, guna menghindari penyalahgunaan keuangan Negara dan tertib administrasi pemerintah mengatur dalam peraturan perundang-undangan

Salah satu fungsi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah melaksanakan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum. Dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut secara cepat, tepat, tertib, dan berkesinambungan, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menerbitkan Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Yang Berkaitan Dengan Keuangan Aset Barang Milik Negara Berupa Tanah.

Buku ini berisi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan.

Demikian, harapan kami semoga penerbitan buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan bagi pihak yang memerlukan.

Jakarta, 2017
Kepala Biro Hukum dan
Hubungan Masyarakat,



Dr. Aslan Noor, S.H., M.H., Sp1.
NIP. 19590412 1

DAFTAR ISI

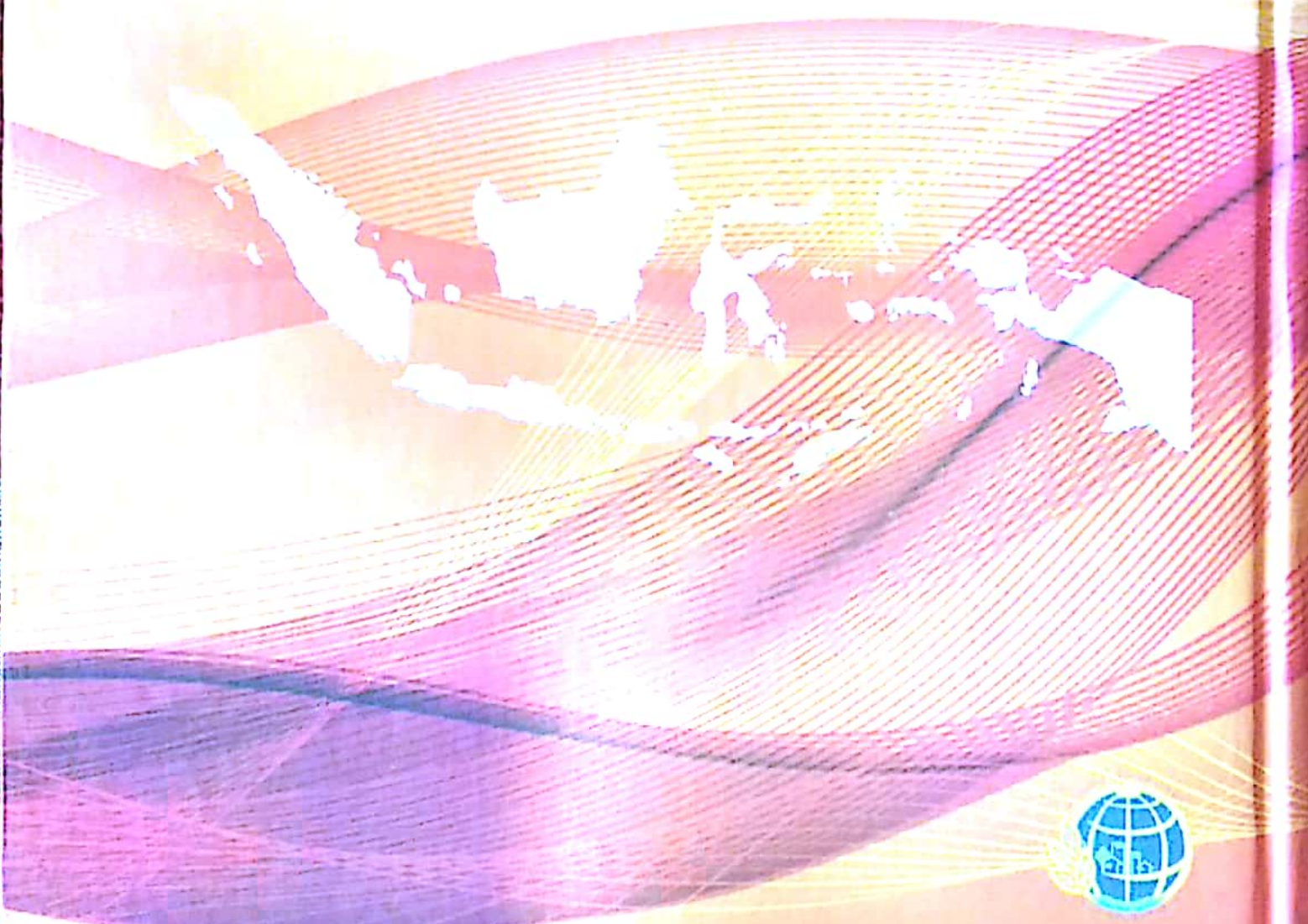
I. KATA PENGANTAR		i
II. DAFTAR ISI		iii
A. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Aset Keuangan Barang Milik Negara		
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Diundangkan tanggal 5 April 2003	Tentang Keuangan Negara	1
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Diundangkan tanggal 14 Januari 2004	Tentang Perbendaharaan Negara	49
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Diundangkan tanggal 3 April 2006	Tentang Laporan Keuangan dan Instansi Pemerintah	123
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Diundangkan tanggal 24 April 2014	Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah	161

- | | | |
|--|--|-----|
| 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Diundangkan tanggal 17 Oktober 2014 | Tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas | 285 |
| 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Diundangkan tanggal 8 Agustus 2011 | Tentang Pengelolaan BMN yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 | 310 |
| 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Diundangkan tanggal 2 Januari 2013 | Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat | 328 |
| 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013 Diundangkan Tanggal 4 Desember 2013 | Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/ 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara | 346 |

- | | | | | |
|-----|--|------------------|---|-----|
| 9. | Peraturan
Keuangan
50/PMK.06/2014
Diundangkan tanggal 17
Maret 2014 | Menteri
Nomor | Tentang Tata Cara
Pelaksanaan
Penghapusan Barang
Milik Negara | 353 |
| 10. | Peraturan
Keuangan
78/PMMK.06/2014
Diundangkan tanggal 30
April 2014 | Menteri
Nomor | Tentang Tata Cara
Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang
Milik Negara | 381 |
| 11. | Peraturan
Keuangan
90/PMK.06/2014
Ditetapkan tanggal 16 Mei
2014 | Menteri
Nomor | Tentang Perubahan
Atas Peraturan
Menteri Keuangan
Nomor
1/PMK.06/2013
tentang Penyusutan
Barang Milik Negara
Berupa Aset Tetap
Pada Entitas
Pemerintah Pusat | 478 |
| 12. | Peraturan
Keuangan
104/PMK.06/2015
Ditetapkan tanggal 29 Mei
2015 | Menteri
Nomor | Tentang Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Negara | 482 |

- | | | | |
|---|------------------|--|-----|
| 13. Peraturan
Keuangan
246/PMK.06/2014
Diundangkan tanggal 24
Desember 2014 | Menteri
Nomor | Tentang Tata Cara
Pelaksanaan
Penggunaan Barang
Milik Negara | 498 |
| 14. Peraturan
Keuangan
4/PMK.06/2015
Diundangkan tanggal 6
Januari 2015 | Menteri
Nomor | Tentang Pendelegasian
Kewenangan Dan
Tanggung Jawab
Tertentu Dari
Pengelola Barang
Kepada Pengguna
Barang | 561 |
| 15. Peraturan
Keuangan
166/PMK.06/2015
Diundangkan tanggal 3
September 2015 | Menteri
Nomor | Tentang Penilaian
Barang Milik Negara | 611 |
| 16. Peraturan
Keuangan
7/PMK.06/2016
Diundangkan tanggal 26
Januari 2016 | Menteri
Nomor | Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
248/PMK.06/2011
Tentang Standar
Kebutuhan Barang
Milik Negara Berupa
Tanah Dan/Atau
Bangunan | 673 |

17. Peraturan Menteri Tentang Tata Cara
Keuangan Nomor Penjualan Barang Milik
14/PMK.06/2016 Negara Berupa
Diundangkan tanggal 29 Kendaraan Perorangan
Januari 2016 Dinas Kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara,
Anggota Tentara
Nasional Indonesia,
Atau Anggota
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Tanpa Melalui Lelang ... 707



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN ADVOKASI DAN DOKUMENTASI HUKUM**